



2022

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LkjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

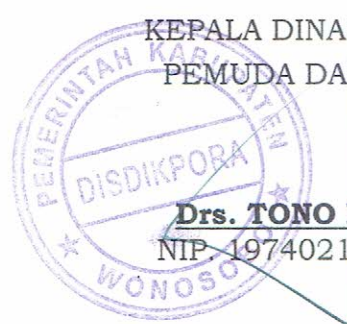
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosobo, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. TONO PRIHATONO**

NIP. 197402111993031001



# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

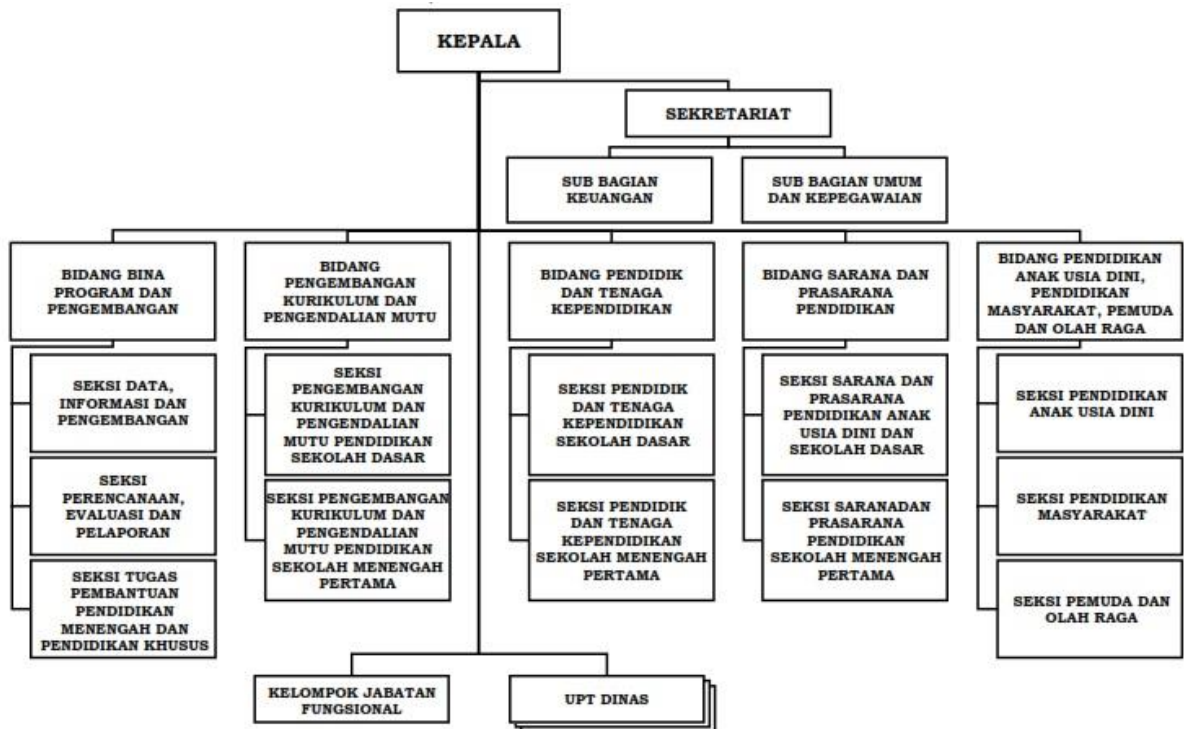
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
2. Mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



### 3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo menetapkan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan dasar,
- b. pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta kesekretariatan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, antara lain sebagai berikut:

- a. Urusan Bidang Pendidikan:
  - 1) masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun.
  - 2) masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - 3) masih terdapat anak usia sekolah tidak sekolah.
  - 4) masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional Pendidikan.
  - 5) belum meratanya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- b. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:
  - 1) prestasi olah raga masih terbatas pada cabang olah raga tertentu.
  - 2) belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olah raga.
  - 3) masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional.
  - 4) masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
  - 5) masih rendahnya wirausaha muda.

### **3.4 Keadaan Pegawai**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan sarana/prasarana perkantoran.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menjadi dasar dalam penempatan pegawai, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Keuangan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Program dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1) Seksi Data, Informasi dan Pengembangan
  - 2) Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
  - 3) Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, membawahkan:
  - 1) Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
  - 2) Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
  - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat
  - 3) Seksi Pemuda dan Olahraga
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
  - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- g. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan :

- 1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
  - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
- h. Unit Pelaksana Teknis Dins (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang - bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian-sub bagian masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, terjadi perubahan struktur organisasi di mana peran UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan digantikan dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang bukan merupakan unit kerja struktural.

Adapun sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

<b>Golongan/ruang</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Jumlah</b>
I/a	Juru Muda	-
I/b	Juru Muda Tk.I	-
I/c	Juru	-
I/d	Juru Tk.I	-
II/a	Pengatur Muda	2
II/b	Pengatur Muda Tk.I	-
II/c	Pengatur	5
II/d	Pengatur Tk.I	2
III/a	Penata Muda	7
III/b	Penata Muda Tk.I	11
III/c	Penata	4
III/d	Penata Tk.I	7
IV/a	Pembina	5
IV/b	Pembina Tk.I	4
IV/c	Pembina Utama Muda	1
IV/d	Pembina Utama Madya	-
IV/e	Pembina Utama	-
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>

Tabel 2.2.2 Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	16
D3	5
S1	17
S2	10
<b>Total</b>	<b>48</b>

### 3.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus baik Fisik dan Non Fisik. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp654.027.369.895,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp597.337.622.657,00 dan belanja modal sebesar Rp56.689.747.238,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

### 3.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Sistematika penulisan LKjIP.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### LAMPIRAN



## **BAB 2**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

##### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Wonosobo “Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui:

Misi III : “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, religious, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern”.

##### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan**

Dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religious, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan Pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan  
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu
  
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemuda dan  
Sasaran 2 : olahraga  
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi
  
3. Tujuan 3 : Berkembangnya inovasi dan pelayanan  
Sasaran 3 : publik untuk kepuasan masyarakat  
Meningkatkan pelayanan public  
Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator sasarannya adalah indeks pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Ringkasan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Baseline		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	angka	10,10	10,25	10,34	10,43	10,52	10,60	10,69
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	11,75	11,84	11,89	11,95	12,00	12,05	12,10
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	6,80	7,07	7,23	7,39	7,55	7,75	7,87
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,70	99,72	99,75	99,78	99,79	99,80	100,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	94,12	95,40	95,95	96,50	97,05	97,60	98,15
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga		Indeks pembangunan Pemuda	angka	N.a	53,50	53,54	53,78	53,88	53,97	54,00
		Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	%	0,037	0,037	0,042	0,044	0,046	0,049	0,049

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Baseline		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Atlet Berprestasi	%	N/A	5,00	5,25	5,51	5,79	6,08	6,40
3	Meningkatkan pelayanan publik		Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
		Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Huruf	BB	BB	BB	BB	A	A	A

### **2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan**

Upaya perwujudan misi tersebut direncanakan melalui program-program baik pada Urusan Pendidikan maupun Urusan Pemuda dan Olahraga, yaitu :

- a. Urusan Pendidikan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- b. Urusan Pemuda dan Olahraga : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Faktor pendorong program pengelolaan pendidikan adalah kualitas sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia dalam bekerjasama meningkatkan kualitas lembaga layanan pendidikan agar sesuai dengan standar, dan upaya mengubah pola pikir peserta didik agar memanfaatkan bantuan ekonomi secara bijak. Lebih lanjut, upaya pemerataan layanan pendidikan mengenai peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik memiliki risiko terhambat. Faktor penghambat upaya ini adalah kesadaran guru akan menilai kompetensi dan keterampilan diri sendiri. Hal terakhir adalah upaya pemberian insentif ekonomi kepada peserta didik berisiko gagal apabila pola pikir keluarga peserta didik cenderung belum siap menyekolahkan anak-anaknya. Faktor lingkungan turut berperan dalam mengubah pola pikir keluarga dan anak.

Program pengelolaan pendidikan juga menangani terkait pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Sekaligus untuk menintegrasikan kurikulum muatan lokal yang bertujuan agar nilai-nilai lokal dapat selalu tertanam dalam pembangunan karakter siswa-siswa. Keberhasilan program ini akan didukung oleh pengembangan kurikulum yang dirancang oleh satuan pendidikan. Akan tetapi, risiko kegagalan program ini dapat terjadi jika implementasi pengembangan kurikulum yang menekankan pada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik tidak dieksekusi dengan bijak oleh guru atau pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran.

Program pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) adalah upaya peningkatan kualitas dari sisi kesejahteraan hidup individu PTK dan pola pikir PTK dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kualitas proses belajar dan mengajar, kesejahteraan PTK harus diupayakan. Melalui program bantuan, kriteria yang jelas akan kesejahteraan PTK harus disusun dengan jelas dan sesuai standar. Meskipun begitu, keberhasilan program ini akan bergantung pada implementasi pendistribusian bantuan dan komitmen guru dalam meningkatkan kompetensi diri.

Sebagai bentuk penterjemahan dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan janji politik kepada masyarakat, maka diperlukan penyelarasan program strategis Bupati dan Wakil Bupati dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Aspek strategis yang dimaksud yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan aspek strategis meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *e-Government* dan penumbuhan inovasi pelayanan. Hal ini mendukung program strategis Wonosobo Smart Regency untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan yaitu secara kontinyu memperkuat teknologi informasi untuk perwujudan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 7 Kegiatan.

Berkenaan dengan mewujudkan aspek strategis meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan kebijakan 1) penyediaan sarana prasarana maupun sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas, serta 2) peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau. Hal ini mendukung program strategis Wonosobo Pinter untuk peningkatan pengelolaan pendidikan. Upaya yang dilakukan yaitu:

Tabel. 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026

VISI	:	TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI III	:	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius ,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1 Meningkatkan kualitas pendidikan	1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	1 Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan	1 Perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup	

VISI		: TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI III		: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius ,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern		
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				2 Penguatan Kurikulum yang inklusif, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing
				3 Peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	1 Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	1 Meningkatkan kecakapan hidup pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri	1 Peningkatan pemberdayaan , pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan
			2 Meningkatkan prestasi olahraga	2 Peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan
				3 Pengembangan olahraga rekreasi
3	Meningkatkan pelayanan publik	1 Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	1 Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	1 Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan





## BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

### 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS OPD	CAPAIAN		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11.95	11.77	98.49%
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.39	6.88	93.10%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99.78	109.85	110.09%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun	96.5	89.52	92.77%
2.	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	0.044	0.04	90.91%
		Persentase Atlet Berprestasi	5.51	5,67	102,90%

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah tahun 2022 tercapai 11,77 tahun dari target 11,95 atau tercapai 98,49%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator harapan lama sekolah mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 11,72 tahun pada tahun 2022 dan 11,73 pada tahun 2021.

Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD atau sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP atau sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun dan tamat SMA atau

sederajat diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah pada Kabupaten Wonosobo tahun 2022 tercapai 6,88 tahun dari target 7,39 tahun atau tercapai 93,10%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 6,81 tahun dan 6,82 pada tahun 2021.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 mencapai 109.85%. Hal tersebut diduga karena adanya anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di Kabupaten Wonosobo juga berasal dari daerah luar Kabupaten Wonosobo, sehingga jumlah anak yang bersekolah jenjang SD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Wonosobo. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SMP, pada tahun 2022 tercapai 89.52%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 10,48% anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP.

Pada indikator Cakupan Pemuda Berprestasi, tercapai 0,04 dari target 0,044 atau 90,91%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peran dan kontribusi pemuda dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2022 belum mencapai target yang diharapkan. Demikian pula untuk indikator Persentase Atlet Berprestasi, dimana pada tahun 2022 belum tersedia hasil perhitungan yang disebabkan data dasar jumlah atlet yang belum tersedia.

### 3.2 Capaian Kinerja Program

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil penilaian kinerja program tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	2022				Target RPJMD
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	91.48	92.33	95.79	103.75	Sangat Tinggi	95.75 angka
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.48	98.48	97.92	99.43	Sangat Tinggi	100.00 angka
3	Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	78.06	79.62	77.95	97.90	Sangat Tinggi	86.18 angka
4	APK PAUD 3-6 tahun	55.77	56.89	47.50	83.49	Tinggi	66.54 angka
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	100.00	100.00	106.74	106.74	Sangat Tinggi	100.00 angka
6	Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	10.00	15.00	6.24	41.60	Sangat Rendah	55.00 %
7	Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	10.00	13.00	35.68	274.46	Sangat Tinggi	30.00 %
8	Persentase sekolah ramah anak	15.00	20.00	8.83	44.15	Sangat Rendah	35.00 %
9	Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	77.77	78.55	73.91	94.09	Sangat Tinggi	81.74 %
10	Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	76.76	77.53	119.81	154.53	Sangat Tinggi	80.68 %
11	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	63.83	69.67	79.08	113.51	Sangat Tinggi	84.47 %
12	Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	70.07	72.92	71.51	98.07	Sangat Tinggi	79.99 %

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	2022				Target RPJMD
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
13	Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00 %
14	Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100.00	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100 %
15	Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	20.00	20.00	59.33	296.65	Sangat Tinggi	27.83 %
16	Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95.34	96.59	57.26	59.28	Rendah	99.00 %
17	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	64.50	65.50	39.24	59.91	Rendah	70.00 %
18	Persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi	35.24	35.59	32.31	90.78	Tinggi	37.04 %
19	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	20.00	25.00	14.52	58.08	Rendah	65.00 %
20	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	0.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00 %
21	Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	0.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi	100.00 %
22	Rasio kecukupan guru kelas SD	0.97	0.98	0.63	64.29	Rendah	1.00 angka

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2021	2022				Target RPJMD
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
23	Rasio ketercukupan guru SMP	0.89	0.91	1.28	140.66	Sangat Tinggi	1.00 angka
24	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	38.89	44.44	68.42	153.96	Sangat Tinggi	66.67 %
25	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5.00	5.00	22.22	444.40	Sangat Tinggi	6.08 %
26	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70,00 %	75%	100%	133,33 %	Sangat Tinggi	90%
27	Persentase pemuda berprestasi	37,00 %	0,04%	0,04%	100,00 %	Sangat Tinggi	0,04%
28	Persentase Wirausaha muda	1,68%	1,8%	22,27 %	1231,67 %	Sangat Tinggi	2,45%
29	Persentase cakupan pelatih yang bersertifikat	62,00 %	64%	21,71 %	33,92%	Sangat Rendah	75%
30	Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	93,00 %	94%	100,00 %	106,38 %	Sangat Tinggi	100%
31	Persentase atlet berprestasi	5,00%	30%	5,67%	18,90%	Sangat Rendah	0%
32	Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	3,00%	6%	1,34%	22,33%	Sangat Rendah	25%
33	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	5,00%	5,25%	20%	380,95 %	Sangat Tinggi	6,38%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mampu melebihi capaian Tahun 2021. Tahun 2021 capaian APK SMP/MTs /Paket B di angka 91,48%, adapun di tahun 2022 mencapai 95,79%. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan sekolah-sekolah keagamaan mendukung tingginya angka partisipasi kasar SMP sederajat. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Penyebab tingginya APK mungkin disebabkan karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang pernah putus bersekolah, atau pengulangan kelas. Di satu sisi masih

terdapat anak yang tidak sekolah yang enggan kembali bersekolah, dan ketika kembali bersekolah usianya sudah melebihi usia sekolah pada pendidikan formal. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama multisektor untuk mendorong masyarakat untuk memasukkan anaknya untuk bersekolah sesuai dengan usianya. Konsep-konsep kesiapan anak dalam bersekolah menjadi faktor penting. Penguatan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal untuk memastikan anak-anak yang usianya sudah melebihi usia sekolah dapat tetap melanjutkan sekolah dengan kualitas layanan yang sama dengan pendidikan formal.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Capaian APM SD/MI/Paket A menunjukkan capaian yang sangat tinggi (99,43%). Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang sekolah dasar sesuai dengan usia anak semakin meningkat. Capaian APM SMP/MTs/Paket B termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini berarti masyarakat sudah cukup menyadari pentingnya pendidikan SMP bagi anak-anaknya. Namun demikian dibandingkan tahun 2021, APM SMP/MTs/Paket B tahun 2022 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,11% ini dimungkinkan karena kondisi ekonomi keluarga, kurangnya minat untuk bersekolah dan memilih untuk bekerja, serta anak penyandang disabilitas. Sehingga beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung APM SD dan SMP adalah dengan melakukan kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan usulan Program Indonesia Pintar untuk mencegah anak putus sekolah, mengoptimalkan program kesetaraan dan kerjasama multisektor untuk memastikan anak berkebutuhan khusus/disabilitas bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun belum memenuhi harapan. Situasi ini terjadi karena beberapa hal di antaranya bahwa belum semua orang tua menyadari pentingnya PAUD bagi perkembangan anak dan kesiapan belajar. Selain itu, di daerah pedesaan di mana mayoritas orang tua bekerja sebagai petani atau pekerja lainnya, orang tua cenderung untuk tidak mengirimkan anaknya mengikuti PAUD dengan alasan tidak ada yang menemani anak ataupun mengantar dan menemani anak. Bupati Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar. Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan tujuan agar anak mempunyai kesiapan belajar dalam melanjutkan pendidikannya. Diharapkan semua pihak mampu untuk bergotong royong, mendorong masyarakat untuk tergerak memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menggerakkan seluruh elemen untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak pada usia dini, dan hal ini didukung pula dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di mana Angka Partisipasi PAUD menjadi salah satu indikator pelayanan Pemerintah Daerah yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun pendidikan bagi anak usia dini.

Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani belum cukup memuaskan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meluncurkan Gerakan Mayo Sekolah, yang merupakan gerakan untuk mendukung anak tidak sekolah untuk

kembali bersekolah dengan pemberian beasiswa. . Gerakan Mayo Sekolah merupakan prioritas Kabupaten dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan nantinya akan meningkatkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Wonosobo. Namun demikian perlu upaya yang lebih komprehensif, mengingat beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, enggan untuk kembali bersekolah. Faktor tersebut antara lain motivasi yang rendah, lingkungan yang kurang suportif, dan kendala akses untuk mencapai satuan pendidikan terutama di satuan pendidikan menengah. Pada faktanya banyak pilihan untuk bersekolah, baik formal, maupun nonformal dan juga sekolah-sekolah keagamaan. Namun demikian hal tersebut belum cukup menarik anak untuk melanjutkan sekolah. Tantangan lain yang dihadapi dalam mengatasi masalah anak tidak sekolah adalah dorongan untuk bekerja yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, menyebabkan orang tua memilih anaknya untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan bersekolah.

Tingkat kesadaran satuan pendidikan untuk menerima Peserta Didik Disabilitas semakin meningkat, tidak hanya pada satuan pendidikan tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan persentase anak dengan disabilitas yang dilayani cukup tinggi. Kendala yang dihadapi antara lain adalah belum semua sekolah melayani anak sesuai dengan kondisinya. Oleh karenanya kebijakan pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang bertugas menjadi jembatan antara anak disabilitas dengan satuan pendidikan diharapkan dapat mulai mengatasi permasalahan tersebut.

Persentase sekolah ramah anak belum memenuhi target, baru 6,24% satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah ramah anak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan sekolah yang aman bagi anak menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dalam mendampingi agar satuan pendidikan aman bagi warga sekolah. Belum tercapainya target pemenuhan sekolah ramah anak dikarenakan adanya overlapping program dengan sasaran/lokus satuan pendidikan (sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah adiwiyata) yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi masing-masing program dan terkesan parsial. Perlu upaya dan advokasi untuk memperluas konsep sekolah aman yang mencakup sekolah aman, ramah, sehat, berwawasan lingkungan dan inklusif.

Capaian kinerja untuk sarana dan prasarana SD belum mencapai target. Adapun untuk SD sudah memenuhi target. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, perlu dioptimalkan. Tidak kalah penting, satuan pendidikan perlu memahami pentingnya untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala sehingga dapat meminimalisir potensi kerusakan bangunan. Satuan pendidikan juga perlu untuk memahami konsep-konsep sekolah aman bencana, sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap potensi bencana.

Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini mencapai angka 79,09%. Situasi tersebut didukung oleh Kebijakan PPDB SD dengan penggunaan NISN dari siswa TK/RA, mendorong orang tua untuk menyekolahkan anaknya di TK/RA., Hanya saja pada sisi lain anggapan orang tua bahwa jenjang PAUD sederajat tidak diperlukan, mendorong orang tua untuk langsung memasukkan anak ke SD. Sehingga terdapat siswa SD yang usianya kurang dari 7 tahun dan

belum cukup siap untuk mengikuti pembelajaran. Perlu dilakukan diseminasi pemahaman kepada orang tua mengenai batas minimal usia masuk SD terkait dengan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran melalui kanal-kanal yang ada.

Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 71,51 %, meningkat dibandingkan tahun 2021, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan ini salah satunya karena adanya peluang beasiswa pendidikan bagi anak tidak sekolah yang kembali bersekolah. Kendala utama yang dihadapi adalah Rendahnya minat anak tidak bersekolah untuk kembali bersekolah dengan berbagai latar. Sehingga perlu untuk terus menguatkan kampanye gerakan Mayo Sekolah dengan melibatkan para pihak dan perlu menggandeng masyarakat/CSR untuk mendukung Gerakan Mayo Sekolah

Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dan Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs merupakan indikator SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Penetapan dan penghitungan capaian dilakukan setiap tahun yang ditetapkan dalam anggaran, program dan kegiatan tahunan. Pemenuhan SPM didukung dengan tersedianya kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku paket.

Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan. Kebijakan akreditasi mendorong satuan pendidikan untuk terus memperbaiki layanan pendidikan. Namun demikian, jumlah/alokasi satuan pendidikan yang diakreditasi telah ditentukan oleh lembaga akreditasi Kemdikbudristek, sehingga upaya untuk meningkatkan akreditasi pada semua satuan pendidikan harus menunggu antrian. Perlu dilakukan komunikasi advokasi untuk menambah alokasi satuan pendidikan yang diakreditasi, menyempang dengan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan sehingga akreditasi yang didapatkan nantinya meningkat.

Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kebijakan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mengalokasikan kuota peserta PPG untuk setiap kabupaten/kota/provinsi, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah peserta PPG. Pemerintah Kabupaten perlu untuk melakukan koordinasi kepada pihak Kemdikbudristek mengenai opsi PPG mandiri atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru PAUD Formal (TK) yang berkinerja baik mendorong guru-guru TK untuk melanjutkan kuliah. Namun belum seluruh pendidik PAUD Nonformal untuk berminat/termotivasi untuk melanjutkan kuliah S1/D-4 bahkan masih terdapat pendidik PAUD yang berijazah SMP dan terkendala pada biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Daerah perlu untuk mendorong pendidik untuk melanjutkan pendidikan, melalui skema-skema yang tersedia.

Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi memang belum memenuhi target, namun capaian yang diperoleh sudah tinggi. Diharapkan perubahan



kebijakan akreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang semula penilaian dilakukan secara manual dan visitasi lapangan, diubah melalui mekanisme rapor pendidikan, akan mendorong lembaga PAUD untuk terus berupaya memperbaiki kualitas layanan.

Rapor pendidikan adalah Indikator terpilih Dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Salah satu sumber Rapor Pendidikan adalah pelaksanaan Asesmen Nasional yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hasil Rapor pendidikan menunjukkan bahwa literasi sudah cukup mencapai kompetensi minimum. Namun untuk kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum. Belum semua satuan pendidikan memahami strategi peningkatan literasi dan numerasi siswa. Sehingga perlu rumusan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi dan numerasi serta mendukung kebijakan pemerintah pusat seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan Perencanaan Berbasis Data)

Rasio kecukupan guru kelas SD masih rendah. Rasio ketercukupan guru SMP sepertinya memang sudah melebihi target dan berlebih. Namun apabila ditelisik lebih jauh, kelebihan guru terjadi di beberapa mata pelajaran, namun di mata pelajaran lain masih kekurangan guru. Diharapkan Kebijakan pemerintah untuk pengangkatan PPPK dengan memprioritaskan guru yang sudah berpengalaman dapat memenuhi kekurangan tersebut.

Satuan pendidikan nonformal yaitu PAUD dan PNF juga wajib memiliki status akreditasi untuk menilai kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Sehingga Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dan melakukan mekanisme pemantauan dan pendampingan kepada satuan pendidikan yang belum terakreditasi.

Pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan terdapat 3 (tiga) indikator yang menentukan keberhasilan capaian kinerjanya yakni persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pemuda berprestasi dan persentase wirausaha muda, dari ke-3 (tiga) indikator tersebut bisa dikatakan berhasil karena status capaiannya semuanya sangat tinggi. Keberhasilan pada indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dari target 75% terealisasi 100% atau capainya sebesar 133,33% Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan yang menjadi pedoman bagi organisasi pemuda untuk berperan dalam pembangunan di kabupaten Wonosobo, sehingga memperkuat kolaborasi antar sektor yang menangani pemuda dan kepemudaan serta organisasi pemuda.

Pada indikator persentase pemuda berprestasi dengan target 0,04% persentase capaian di akhir tahun 2022 sebesar 100% ketercapaian ini karena semakin banyaknya peluang bagi pemuda untuk mengembangkan/mengoptimalkan minat atau bakat dan potensinya melalui berbagai ajang, selain itu juga tak lepas dari adanya usaha giat membangun ASUH PEMUDA dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah pengelola pemuda dan

menjadikan ASUH PEMUDA sebagai bentuk kerja kolaborasi pembangunan pemuda, juga adanya penyusunan pola kemitraan dengan multi pihak dengan skema pola kursus singkat magang pemuda dan per group training.

Indikator Persentase wirausaha muda capaiannya sebesar 1231,67% dari target 1,8 % atau terealisasi 22,27%, hal ini dikarenakan minat berwirausaha pemuda tumbuh pesat karena faktor kemudahan dalam teknologi, namun belum semua pemuda meyakini wirausaha merupakan pilihan profesi, sehingga berdampak pada wirausaha yang tidak long lasting., maka untuk lebih mengoptimalkan kewirausahaan muda pihaknya (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo) melakukan terobosan terobosan dengan mengembangkan Pendidikan kewirausahaan sejak dini di sekolah, selain itu juga menyelenggarakan forum-forum wirausaha muda.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ini didukung oleh empat indikator yakni : persentase cakupan pelatih yang bersertifikat; persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga; persentase atlet berprestasi; dan persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi.

Berdasarkan capaian empat indikator pada urusan Kepemudaan dan Olahraga hanya ada satu indikator yang status ketercapaiannya sangat tinggi yaitu pada indikator persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga dari target 94% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 106,38% hal ini dikarenakan adanya peran KONI sebagai koordinator dan pembina olahraga yang cukup bagus dalam melakukan terobosan-terobosan penguatan pada cabang-cabang olahraga. Sementara tiga lainnya masing-masing sangat rendah adalah persentase cakupan pelatih yang bersertifikat dari target 64% terealisasi 21,71% atau dengan capaian 33,92% hal ini dikarenakan minimnya pelatih bersertifikasi padahal animo masyarakat untuk menjadi atlet sangat tinggi, untuk mendorong agar semakin banyaknya pelatih yang bersertifikat maka KONI akan didorong untuk menyelenggarakan program pelatih bersertifikat. Persentase atlet berprestasi di Kabupaten Wonosobo masih sangat rendah dari target 30% hanya terealisasi 5,67% atau tercapai 18,90% hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal padahal minat masyarakat dalam olahraga prestasi semakin meningkat maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mengingat limitasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dari sumber daya manusia, pengelolaan dan anggaran. Sehingga diperlukan strategi kolaborasi dengan prinsip jejaring untuk mendukung pembangunan keolahragaan mengingat minat masyarakat dalam olahraga prestasi semakin meningkat. persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi sangat rendah, ini dapat dilihat dari target 6% hanya terealisasi 1,34% atau capaiannya hanya sebesar 22,33% hal ini dikarenakan pembinaan olahraga rekreasi belum sepenuhnya terarah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga padahal animo masyarakat terhadap olahraga rekreasi sangat meningkat sehingga diperlukan penguatan kelembagaan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga rekreasi.

Pada Proram Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdapat satu indikator yakni persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan dengan status ketercapaian sangat tinggi yaitu capaian 380,95% dari target yang telah ditentukan 5,25% terealisasi 20% hal ini dikarenakan Pendidikan pramuka

merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua siswa/pelajar selain itu juga dilakukan penguatan terhadap lembaga kepramukaan guna mengembangkan karakter anak-anak.

### **3.3 Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain:

- a. Belum terpenuhinya SPM berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- b. Rapor Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikburistek merupakan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan, belum sepenuhnya dipahami oleh satuan pendidikan. Hal ini berdampak pada kurangtepatnya intervensi dalam peningkatan kompetensi literasi dan numerasi serta lingkungan sekolah yang inklusif.
- c. Pendidik PAUD Nonformal, Tutor dan pamong belajar belum seluruhnya memenuhi kualifikasi minimal
- d. Masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa Pendidikan bukan hal yang primer. Hal ini berdampak pada kurangnya minat untuk kembali bersekolah.
- e. Masyarakat yang beranggapan kurang pentingnya PAUD berdampak pada kesiapan anak pada saat masuk SD.
- f. Masih terdapat SMP yang jaraknya cukup jauh dari domisili peserta didik dan tidak ada/minim transportasi umum.
- g. Untuk mencukupi kebutuhan guru, daerah tergantung pada formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Pada urusan Pendidikan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp172.947.259.550,00 dan terealisasi sebesar Rp168.196.769.053,00 atau 97,25%. Adapun rincian alokasi program, anggaran dan realisasi sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Muatan aktivitas dalam program pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang mendorong perluasan akses pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk Tahun 2022, alokasi anggaran untuk mendukung Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp172.536.509.550 dengan persentase serapan anggaran mencapai 97,27%.

Adapun untuk kegiatan-kegiatan pendukung Program Pengelolaan Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Pendidikan SD.

Kegiatan Pengelolaan SD bertujuan untuk menopang aksesibilitas dan partisipasi dan pengembangan potensi peserta didik pada Sekolah Dasar. Oleh karenanya sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada

tahun 2022 diharapkan dapat mencapai target kinerja pendidikan dasar, khususnya pada jenjang SD. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Pendidikan SD senilai Rp11.003.788.000, digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi dan pembangunan ruang guru/kepala sekolah, rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan, pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif, serta pengadaan TIK Pendidikan dan media pendidikan. Kebijakan DAK Pendidikan Tahun 2022 menekankan pada konsep ketuntasan atau yang dikenal dengan Revitalisasi. Sebagai ilustrasi pada tahun 2022, fokus ketuntasan adalah pemenuhan TIK, sehingga untuk sekolah yang diusulkan belum memiliki TIK diprioritaskan untuk diberikan Alat TIK. Setelah Alat TIK, prioritas diberikan untuk penuntasan berbasis sekolah terutama untuk sekolah yang memiliki kebutuhan rehabilitasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta mendorong daerah untuk bersinergi dalam pemenuhan sarana dan prasarana dengan sumber pendanaan di APBD. Terdapat 20 SD yang mendapatkan alokasi DAK prasarana pendidikan, 1 (satu) SD yaitu SD Negeri Kapencar mendapat TIK pendidikan dan 28 SD mendapatkan media pendidikan.

Guna menambah daya tampung dan meningkatkan kenyamanan pembelajaran, dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Rp 1.959.000.000 digunakan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru pada 4 MI dan 6 SD, dengan serapan anggaran mencapai 99,2 % dan pembangunan fisik selesai 100%. Agar pelaksanaan proses pelayanan pendidikan pada MI Rifaiyah Dalangan terlaksana dengan baik, dibangun Ruang Guru dengan anggaran Rp200.000.000 dan terserap Rp188.000.498,00.

Salah satu upaya untuk mewujudkan SDM berkualitas adalah melalui peningkatan derajat kesehatan anak usia sekolah melalui aktivitas Sekolah Sehat. Kampanye Sekolah Sehat dikuatkan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas berkarakter. Komponen Sekolah Sehat meliputi Trias UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.), Stratifikasi Usaha Kesehatan (UKS) dan Prasarana dan Sarana UKS. Untuk mendukung pemenuhan prasarana dan sarana UKS hal tersebut, dibangun ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), bersumber dari DAK dan DAU pada 14 SD dengan total serapan anggaran Rp2.011.762.910 (97,32%). Diharapkan dengan pembangunan ruang UKS maka satuan pendidikan akan semakin termotivasi untuk mewujudkan sekolah sehat.

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa. Secara operasional pemanfaatan perpustakaan sekolah ini bisa digunakan oleh siswa, guru, atau pemakai lainnya sebagai sumber informasi untuk mengembangkan potensi diri meliputi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor). Dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah, khususnya kualitas siswa, maka perlu dibangun sebuah perpustakaan yang mampu menjadi sumber belajar. Sehingga pada tahun 2022, untuk mendukung minat baca dan

kemampuan literasi peserta didik, diselenggarakan pembangunan ruang perpustakaan dengan rincian 5 SD didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu SD N 1 Kayugiyang, SD N 1 Lengkong, SD N 2 Limbangan, SD N 3 Binangung dan SD N 3 Lumajang. Sementara, pembangunan ruang perpustakaan SD N 2 Sedayu, SD N 2 Tambi, SD N 2 Tegeswetan, SDN 3 Gondowulang, SD N 3 Jangkrikan, SD N Jogoyitnan, dan SD N Keseneng bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk peningkatan fungsi perpustakaan, diselenggarakan penyempurnaan ruang perpustakaan pada 6 SD dengan sumber dana APBD, dengan serapan anggaran mencapai 98,16 % dari anggaran senilai Rp620.050.000,00.

Sub kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah merupakan sub kegiatan yang terdiri dari pembangunan prasarana pendidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar sederajat. Anggaran sejumlah Rp8.638.784.000 dapat terserap sebesar Rp8.371.170.270 atau sekitar 97%. Anggaran ini digunakan untuk penataan lingkungan, pembangunan ruang laboratorium komputer, pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya.

Pada 33 SD Negeri, MI Ma'arif Klesman, MI Ma'arif Tegalgot dan MI Muhammadiyah Kalikajar dan MI Ma'arif Slukatan mendapatkan alokasi untuk penataan lingkungan untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan madrasah. Adapun MI Ma'arif Tawang Sari mendapatkan alokasi untuk penyempurnaan ruang kelas.

Guna melayani anak berkebutuhan khusus, SD Negeri Kuripan Kecamatan Garung mendapatkan pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif lengkap beserta perabotannya. Ruang ini diperuntukkan sebagai ruang belajar peserta didik disabilitas jika terjadi kendala belajar dan/atau sebagai ruang konseling dan/atau ruang terapi khusus ketika terjadi kondisi tertentu pada peserta didik disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak dilaksanakan pada 24 SD Negeri, 1 SD swasta dan 4 MI dengan sumber dana baik dari DAK maupun DAU. Rehabilitasi ruang kelas rusak dilaksanakan untuk meningkatkan kenyamanan siswa dan tenaga pendidik dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Rehabilitasi ruang guru bersumber dari DAK senilai Rp303.705.000,00 diselenggarakan di SD N 2 Kaliwiro, SD N 3 Jangkrikan dan SD N Keseneng. Rehabilitasi sedang perpustakaan SD diselenggarakan di SD N Keberengan Mojotengah. Adapun untuk rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah senilai Rp564.838.000,00 terserap 92% dengan lokasi SD N Siwuran, SD N Igrimranak, SDN 2 Gadingsukuh, SD N 2 Bumirejo dan MI Muhammadiyah Besani.

Guna mendukung literasi digital bagi siswa SD dan mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional secara mandiri, selain dari Dana DAK, 16 SD Negeri dan 6 MI mendapatkan peralatan TIK untuk mendukung pembelajaran dengan dana bersumber dari daerah, yang pengadaannya melalui metode e-purchasing.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terus menerus berupaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara usia 7-12 tahun untuk menempuh

pendidikan Sekolah Dasar melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD pada satuan pendidikan negeri. Terdapat 3 (tiga) jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Untuk memudahkan akses pendaftaran, sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik, mengakomodir pemeliharaan aplikasi PPDB SD Negeri daring. Sehingga orang tua tidak perlu melakukan antrian pendaftaran, tetapi cukup melakukan pendaftaran secara daring dengan mengunggah berkas-berkas yang dipersyaratkan.

Keluaran lain dari sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik adalah penyelenggaraan rangkaian Asesmen Nasional pada jenjang SD. Sejak tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan asesmen nasional sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pendidikan. Asesmen Nasional yang diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar. Hasil dari Asesmen Nasional tertuang dalam Rapor Pendidikan yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk memperbaiki proses layanan pembelajaran.

Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dilakukan untuk mendukung prestasi akademik dan non akademik. Jenis perlombaan yang diselenggarakan meliputi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), serta Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI). Cabang yang diperlombakan dalam FLS2N meliputi gambar bercerita, kriya anyam, menyanyi tunggal, pantomim dan seni tari. FL2SN merupakan ajang rutin yang diselenggarakan tiap tahun oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan bersifat berjenjang sampai ke tingkat Nasional. Ajang berjenjang lainnya yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD. Kabupaten Wonosobo mengirimkan perwakilan ke jenjang Provinsi pada cabang pencak silat. Adapun lomba MAPSI yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Agama Islam dan diselenggarakan secara berjenjang sampai tingkat provinsi menampilkan 17 cabang lomba. Anggaran yang terserap untuk sub kegiatan ini sebesar Rp106.430.000,00. dari total anggaran Rp137.300.000,00.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD yang terdiri atas 205 orang. Insentif ini diharapkan dapat membantu dan memberikan motivasi kepada pendidikan dan tenaga kependidikan untuk tetapi berkinerja baik dalam pelayanan pendidikan. Untuk memastikan layanan terhadap pendidik, sub kegiatan Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar digunakan untuk mengembangkan aplikasi kepegawaian, pengelolaan angka kredit bagi guru dan pengawas SD, mendukung penyelenggaraan PTK Prestasi dan Kompetisi Guru Nasional.

Keluaran sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah antara lain adalah fasilitasi Dewan Pendidikan, Lomba Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Workshop Persiapan dan

Evaluasi Akreditasi Sekolah. Lomba sekolah sehat diselenggarakan untuk mendukung revitalisasi Usaha Kesehatan. Diharapkan melalui lomba tersebut dapat menstimulasi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah Adiwiyata merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah. Terdapat 8 (delapan) satuan pendidikan yaitu SD N 1 Kalikajar, SD N 1 Kalimendong, MI Ma'arif Kejiwan, SMP Negeri 1 Kertek, SMP Negeri 1 Sapuran, SMP Negeri 3 Kertek, SMP Negeri 3 Kalikajar dan MTs Ma'arif Garung yang telah ditetapkan dan menerima penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tahun 2022-2026.

Program Sekolah Ramah Anak merupakan program yang mendorong satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah satu lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Terdapat 50 satuan pendidikan terdiri dari 25 SD dan 25 SMP yang telah melakukan deklarasi Sekolah Ramah Anak.

Salah satu indikator satuan pendidikan berkinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah dengan adanya akreditasi satuan pendidikan.. Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi dapat dipandang sebagai instrumen regulasi diri (self-regulation), dengan maksud agar suatu agar Sekolah dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri; dan berdasarkan atas pemahaman kekuatan dan kelemahan diri tersebut, sekolah dapat melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan (quality continues improvement). Terdapat 131 SD dan 40 SMP pada tahun 2022 mengikuti re-akreditasi. Total anggaran senilai Rp220.000.000,00 terserap 96,47%.

Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD) yang merupakan DAK Nonfisik bidang Pendidikan yang digunakan untuk mendukung biaya nonpersonal bagi satuan Pendidikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, 460 SD mengelola dana BOS yang diterima untuk pelayanan pendidikan. Total pagu anggaran sebesar Rp60.651.000.000,00 telah disalurkan ke seluruh SD dengan serapan mencapai 98%.

## 2) Pengelolaan Pendidikan SMP

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP terdiri atas 20 (dua puluh) sub kegiatan. Secara umum kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan SMP sederajat. Sehingga pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan

dukungan pada pembangunan Ruang Kelas Baru pada MTs Aswaja Burat Kepil, MTs Ma'arif Binaul Akrom Krinjing Watumalang, MTs Nurul Chusna Selomerto, SMP Pelita Al Qur'an Krasak Mojotengah dan SMP N 1 Garung dengan total anggaran sebesar Rp982.500.000,00. Untuk mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp5.998.051.000,00 untuk revitalisasi SMP N 1 Watumalang, SMP N 1 Kepil, SMPN 2 Kepil, SMP N 2 Watumalang. SMP N 1 Watumalang mendapatkan alokasi DAK terbesar yaitu senilai Rp2.339.280.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Laboratorium Komputer, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, Rehabilitasi Sedang/berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Rehabilitasi Jamban/Toilet beserta sanitasinya. Mekanisme pengadaan dilakukan melalui lelang konsolidasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP N 2 Selomerto dan SMP N 5 SATAP Kalibawang. Selain itu juga digunakan untuk Pembangunan Laboratorium SMPN 3 SATAP Kejajar dan SMP N 5 SATAP Sapuran. Fasilitas parkir dibangun di SMP N 1 Selomerto dengan anggaran Rp100.000.000,00 sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga satuan pendidikan. Anggaran pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp2.352.500.000,00 terserap Rp2.339.280.000,00 (93%). Anggaran ini digunakan untuk penataan lingkungan di SMP Takhasus Al Qur'an 2 Deroduwur, SMP Darussalam Islamic Boarding School Ngadiono, SMP N 2 Kalibawang, SMP N 2 Wadaslintang, SMP N 3 Kalikajar, SMP N 4 Kalikajar, SMP N 4 Kepil, SMP N 5 SATAP Kalikajar, SMP N 3 Wonosobo, SMP N 4 SATAP Kalibawang, SMPN 4 Kertek, SMP N 2 Kertek, SMP N 1 Wonosobo dan SMP N 3 Kertek. Selain itu SMP N 2 Wonosobo mendapatkan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling dan Satpam. Adapun untuk mendukung lingkungan sekolah sehat, SMP Alfa Ali Masykur Mojotengah mendapatkan anggaran pembangunan toilet dan sanitasinya.

Guna mendukung kenyamanan para pendidik, SMP N 1 Kejajar dan SMP N 1 Mojotengah mendapatkan anggaran untuk mendukung Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru. Sedangkan untuk kenyamanan prasarana pendukung literasi buku, dilakukan rehabilitasi atap perpustakaan SMP N 2 Kalikajar.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, sehingga diluncurkan Gerakan Mayo Sekolah. Gerakan ini diselenggarakan dalam rangka mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah. Sebanyak 199 anak terdiri atas 89 anak di sekolah formal dan 110 anak di satuan pendidikan nonformal, mendapatkan beasiswa pendidikan yang digunakan untuk mendukung biaya personil anak tersebut.

Untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran berbasis teknologi MTS Al Maksu Wonosobo, MTS Ma'arif Kejajar, MTs Ma'arif Tieng kejajar dan SMP N 3 Wonosobo mendapatkan pengadaan peralatan TIK. MTs Al



Ghozaly Siwatu, dan SMP Islam Wadaslintang mendapatkan paket komputer. Adapun SMP Al Madina, MTs Al Futuhiyyah SMP Darussalam dan SMP Al Fathoniyah mendapatkan paket laptop. Total anggaran sebesar Rp1.330.000.000,00 terserap 98,30 %, dengan metode pengadaan dilakukan melalui e-purchasing.

Sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan metode daring. PPDB daring untuk jenjang SMP terdiri dari 4 (empat) jalur yaitu zonasi (50%), afirmasi (15%), perpindahan tugas orang tua (5%) dan sisa nya diberikan pada jalur prestasi (30%). Di samping itu, sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan asesmen nasional jenjang SMP yaitu pelatihan proktor. Selain itu untuk ketepatan penulisan ijazah, diselenggarakan rapat sosialisasi penulisan ijazah.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP merupakan media untuk penyelenggaraan kegiatan ajang prestasi siswa yang meliputi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), serta Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI). Cabang perlombaan FLS2N terdiri atas Festival Kreativitas Tari, Festival Kreativitas Musik Tradisional, Lomba Gitar Duet, Lomba Menyanyi Solo dan Lomba Desain Poster. Cabang yang diperlombakan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional yaitu pencak silat dan karate. Untuk MAPSI terdiri dari 12 cabang.

Sebanyak 238 pendidik dan tenaga kependidikan non ASN SMP diberikan insentif untuk mendukung kinerja. Anggaran yang digunakan untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah digunakan untuk mendukung kinerja 17 (tujuh belas) SMP Negeri Satu Atap diberikan bantuan operasional daerah. Selain itu, untuk memastikan 40 SMP lolos reakreditasi, dilakukan workshop Akreditasi. Workshop ini diselenggarakan untuk membantu satuan pendidikan yang menjadi lokus re akreditasi, mengisi aplikasi SISPENA sesuai dengan kondisinya dan memastikan semua tahapan sesuai dengan situasi satuan pendidikan.

Dana BOS reguler SMP disalurkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening 103 satuan pendidikan. Dana yang telah disalurkan sebesar Rp32.044.590.000,00 dengan serapan mencapai 97%.

### 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kontribusi besar terhadap tumbuh-kembang anak. Usia 0-6 tahun merupakan masa pertumbuhan fisik dan fungsi otak, di mana pada masa ini sel-sel otak anak berkembang dengan cepat. Dengan kecepatan masa perkembangan otak ini, anak membutuhkan stimulan yang berkualitas yang akan membantu menentukan pembentukan karakter, kecerdasan dan pertumbuhan fisik yang optimal. Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan untuk wadah tumbuh kembang anak karena akan membantu perkembangan anak sebelum masuk sekolah dasar terutama dalam keterampilan sosial, emosional, motorik, kognitif dan berbahasa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya keras untuk mendorong partisipasi anak usia 5-6 Tahun melalui Gerakan Kembali Ke PAUD. Karena masih banyak orang tua yang memandang PAUD tidak terlalu penting dan cenderung langsung

menyekolahkan anak ke jenjang sekolah dasar sederajat. Total anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp20.381.150.000,00 dengan serapan anggaran mencapai Rp 20.246.534.004 atau sebesar 99%. Pagu terbesar diperoleh dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, senilai Rp14.614.200.000,00 yang digunakan untuk operasional 665 PAUD dalam menunjang layanan pembelajaran.

Aktifitas-aktifitas yang menunjang perkembangan anak antara lain, Gebyar Anak Usia Dini dan fasilitasi kegiatan mendongeng diselenggarakan dengan melibatkan anak-anak usia dini dan lembaga PAUD.

Kualitas layanan PAUD tidak terlepas dari peran pendidik. Sebanyak 100 guru mengikuti Diklat berjenjang guru PAUD. Tema diklat selaras dengan kebijakan Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan angka stunting. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD digunakan untuk melaksanakan fasilitasi bagi GOP TKI dan pemetaan mutu dan akreditasi lembaga PAUD. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, persentase kenaikan lembaga PAUD berakreditasi B menjadi salah satu indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2022 terdapat 6 lembaga PAUD terakreditasi A, 103 lembaga terakreditasi B dan 32 lembaga PAUD terakreditasi C. Sehingga perlu upaya dari berbagai pihak agar semua lembaga PAUD bisa terakreditasi B.

Sebagaimana pendidikan dasar, sarana dan prasarana lembaga PAUD merupakan salah aspek yang pemenuhan layanan PAUD. Anggaran Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp1.328.000.000,00 terserap sebesar Rp1.316.172.000,00 untuk 7 lembaga yaitu KB RA Kartini Gondowulan Kecamatan kepil, PAUD Al Qur'an Saadatul Islam Jamban Kalibeber, RA Fatimatuzzahro Garung, RA Masyitoh Pacarmulyo Leksono, TK Pertiwi Kenjer Kertek, TK Pertiwi Sumberwulan Selomerto, TK Dharmawanita Leksono, TK Kasih Ibu Krakal Dawung Kecamatan Kertek dan TK Pertiwi Dewi Ratih Binangun Kecamatan Watumalang, serta TK Desa Keseneng Kecamatan Mojtengah.

Guna menunjang keamanan dan kenyamanan satuan pendidikan, TK Pertiwi Siwuran Garung mendapatkan pembangunan kantin, TK Pertiwi 3 Tirip Kecamatan Wadaslintang mendapatkan pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dan TK Pertiwi Gumiwang mendapatkan penataan lingkungan. Sementara TK Desa Keseneng mendapatkan penyempurnaan ruang kelas. Lembaga PAUD Al Hidayah Sumberejo. RA Masyitoh mergosari, TK Pertiwi 1 Pungangan, TK Pertiwi Kramatan dan TK ABA Kaliwuluh Kecamatan Kepil mendapatkan anggaran untuk rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD, dengan total anggaran Rp750.000.000,00 dengan serapan anggaran Rp743.891.000,00 (99,19%).

Mebel PAUD didistribusikan ke PAUD Al Ikhlas Desa Siwuran Kecamatan Garung, PAUD Annajah Gemblengan, RA Perwanida, TK Pertiwi Tlogo dan TK Sigedang Kecamatan Kejajar dengan serapan anggaran mencapai 96,39%.

#### 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pendidikan Nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan dengan program pembelajaran yang terselenggara secara terancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada diri peserta didik. Total anggaran pendukung pengelolaan pendidikan nonformal sejumlah Rp10.290.165.000,00 dan terserap Rp10.181.792.346,00 atau 99%.

Bentuk satuan pendidikan Nonformal yang ada di Kabupaten Wonosobo terdiri atas 19 PKBM dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Nonformal SKB. Lembaga tersebut mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan senilai Rp3.329.100.000,00. BOP dimaksud untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C.

Anggaran sebesar Rp5.172.500.000,00 dialokasikan untuk mendanai sub Kegiatan Pembangunan gedung/ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/kesetaraan. Anggaran ini digunakan untuk melakukan penyempurnaan/pembangunan ruang pada 27 TPQ dan Madin. Ponpes Sabillillah Yayasan Bina'ul Akrom Sendangsari Garung, Madin Darul Muttaqin Dusun Karangrejo Dempel Kalibawang, PKBM Catur Sakti, TPQ AL Hidayah Dusun Bedali Desa Kuripan Watumalang dan Madin Al Gozali Kumejing dan TPQ Al Huda Dusun Kalimade Desa Karangrejo mendapatkan paket pada sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan senilai Rp837.500.000,00 dan terserap 99%. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan digunakan untuk rehabilitasi Ruang Belajar Madin AlIttihad, Tegalsari, Kecamatan Garung, TPQ Tarbiyatul Mumtadiin Dusun Kongsi Desa Bumirejo, Mojotengah dan TPQ Al Muttaqin, Kuripan, Garung.

Guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal, diselenggarakan bintek kurikulum Merdeka, penyusunan soal ujian, dan monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional serta Pekan Olahraga Kesetaraan. Total anggaran sebesar Rp279.440.000,00 terserap 97,70%.

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diselenggarakan untuk menyelenggarakan kegiatan penguatan data pokok pendidikan kesetaraan dan pembinaan kelembagaan dan manajemen penyelenggara pendidikan kesetaraan. Sub kegiatan ini 100% terselenggara baik fisik maupun keuangan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Mulai Tahun Ajaran 2022/2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka. Pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 s.d. 2024, Kemendikburistek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan

yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan akan optimal dengan dukungan muatan lokal dan konsep enterpreneur. Sebanyak 100 orang dilatih untuk mengikuti pelatihan entepreneur.

Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2021, nilai numerasi Kabupaten Wonosobo berada pada angka 1,64 (di bawah kompetensi minimum) untuk jenjang SD dan 1, 80 (di bawah kompetensi minimum) untuk jenjang SMP. Sehingga program ini dimanfaatkan untuk melakukan pelatihan numerasi bagi 565 guru jenjang SD dan SMP . Anggaran sebesar Rp150.000.000,00 terserap Rp144.090.400,00.

Sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada program Pengembangan Kurikulum difokuskan pada implementasi Kurikulum Merdeka. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal diselenggarakan untuk Fasilitasi Implementasi Kurikulum PAUD Tahun 2013 berbasis Loose Part and STEAM dengan peserta sebanyak 100 orang. Sementara pada pendidikan nonformal menyelenggarakan Bimtek Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Kurikulum Merdeka.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan total anggaran Rp100.000.000,00 dan terserap Rp85.505.000,00. Anggaran ini digunakan untuk Pelatihan Penulisan Jurnal Pendidikan, Pembekalan Kepala Sekolah, Pemetaan Guru SMP dan fasilitasi Program Guru Penggerak. Dengan semakin berkurangnya tenaga Penilik dan Pamong Belajar, anggaran ini juga digunakan untuk kegiatan rekrutmen penilik dan pamong belajar.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan perizinan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerbitkan izin pendirian PAUD yaitu TK Al Akhyar dan Pos PAUD Tunas Bangsa. Untuk lembaga pendidikan nonformal yaitu PKBM An Nidhom dan PKBM Inka. Sedangkan untuk pendirian satuan pendidikan dasar yang diterbitkan izinnnya yaitu SD Islam Baitul Mujahdin, SD Tahfidz Sa'adatul Islam, SMP Al-Munawaroh dan SMP Al Islah. Total anggaran untuk program ini sebesar Rp96.250.000.000,00.

e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda yang bermutu dan berprestasi. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.041.000.000,- ini terealisasi sebesar Rp. 1.016.574.010,- atau persentase realisasi anggaran

sebesar 97,65%. Program ini dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu a) organisasi; b) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.

Kegiatan Organisasi Pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi sebanyak 300 siswa, atlet, pemuda, pendidik dan masyarakat; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dengan melakukan workshop wawasan kebangsaan dan bela negara bagi 120 pengurus OSIS; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera untuk pelaksanaan paskibra Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.

Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yakni: peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota yaitu dengan melakukan pelatihan kewirausahaan berupa pelatihan membuat dan handycraft kepada 70 Pemuda di kecamatan kepil; jambore pemuda dengan ikut serta dalam pelaksanaan jambore pemuda tingkat jawa tengah di solo; Kajian banding penyusunan RAD kepemudaan dilakukan dengan mengikuti kajian banding penyusunan RAD kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo yang diikuti 100 orang; serta sosialisasi Perda Kepemudaan dengan melakukan sosialisasi perda terhadap pemuda dan organisasi yang ada di Kabupaten Wonosobo.

f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan olahraga yang bermutu dan berprestasi. Program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.360.000.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 12.134.040.640,- atau sebesar 98,17%. Program ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yakni a) kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b) penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota; c) pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota; d) pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; e) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, di tahun 2022 telah dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yakni: Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha dengan hasil berupa training of trainer bulu tangkis bagi guru, training of trainer tenis meja bagi guru dan training of trainer taekwondo bagi guru masing-masing diikuti 30 guru; Pada sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yakni dengan hasil berupa pembangunan 1 (satu) mini stadion kelurahan pagerkukuh dengan anggaran dari Banku; pembangunan 1 (satu) venue gor wonolelo; dan 1 (satu) kegiatan pengadaan prasarana olahraga sepakbola dan volly untuk 16 klub olahraga.

Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yakni : Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah sejumlah 3 (tiga) kegiatan yaitu POPDA tingkat Kabupaten, POPDA eks. Karesidenan Kedu dan POPDA Provinsi Jawa Tengah ; Pada sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dilaksanakan dengan memfasilitasi 2 olahraga untuk disabilitas.

Pada tahun 2022 melalui sub kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota telah dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet berprestasi Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dilakukan melalui sub kegiatan pengembangan organisasi keolahragaan yakni dengan memfasilitasi sejumlah organisasi keolahragaan untuk kegiatan selama tahun 2022.

Pada Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di tahun 2022 dilakukan melalui sub kegiatan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi, yaitu berupa pemberdayaan terhadap perkumpulan olahraga rekreasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi yang ada di Kabupaten Wonosobo.

g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,- atau tercapai 100%. Program ini hanya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan sub kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah dengan memfasilitasi kwarcab.

## **BAB 4**

### **Penutup**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis 2021-2026 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Program) dan Tugas Pokok dan Fungsi kepada semua masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Nasional selama Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan implementasi tahun pertama dalam periode perencanaan pembangunan daerah 2021-2026, sehingga beberapa indikator kinerja belum mencapai target dan diperlukan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya. Namun demikian, beberapa indikator kinerja dapat mencapai target yang perlu dijaga dan terus dipertahankan untuk tahun berikutnya. memerlukan intervensi yang tepat dan kerjasama semua pihak sehingga sasaran utama pendidikan dapat tercapai.

Dengan adanya Upaya intervensi dan kolaborasi dengan semua pihak, diharapkan terjadi penguatan serta konsistensi sebagai upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo secara khusus serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada umumnya.

Wonosobo, Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. TONO PRIHATONO**  
NIP. 197402111993031001

